



Judul : PKB lobi fraksi lain loloskan RUU TPKS
Tanggal : Senin, 03 Januari 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

PKB Lobi Fraksi Lain Loloskan RUU TPKS

WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan fraksinya di DPR RI akan melakukan lobi politik ke fraksi lain demi meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Menurutnya, RUU TPKS mendesak segera disahkan menjadi undang-undang mengingat maraknya kasus kejahatan dan kekerasan seksual. "PKB akan melakukan lobi dan pendekatan kepada fraksi yang masih ragu atau tidak mendukung," ujar Jazilul ketika dihubungi, kemarin.

Jazilul menerangkan PKB juga akan mendorong agar RUU TPKS segera masuk daftar prioritas legislasi pada 2022. Diharapkan RUU tersebut bisa dibahas secepatnya. Pasalnya, pengesahaan RUU TPKS juga merupakan bagian dari rekomendasi Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar pada akhir Desember 2021.

Sejauh ini ada tujuh fraksi di DPR yang menyetujui RUU TPKS untuk menjadi RUU usulan inisiatif dewan dan segera dibahas, yaitu PDI Perjuangan, Partai Gerindra, PKB, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, dan Partai NasDem.



Adapun satu fraksi, yakni Golkar, meminta penundaan pembahasan. Sebaliknya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak lantaran ada substansi yang tidak disepakati. Alasan Fraksi PKS menolak karena ingin ada aturan mengenai pelarangan perzinaan dan penyimpangan seksual.

Dalam merespons hal itu, Jazilul menjelaskan perbedaan pandangan terkait substansi bisa dibahas dengan melibatkan para pakar dan tokoh. "Perbedaan pandangan itu hal biasa dalam dinamika pembahasan sebuah rancangan undang-undang. Namun, RUU TPKS harus segera dibahas agar ada payung hukum komprehensif dalam menangani kasus kekerasan seksual."

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Maarif Institute Abdul Rohim Ghazali mengatakan RUU TPKS dan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) mendesak disahkan tahun ini.

Menurutnya, kedua RUU tersebut diharapkan dapat memberi keadilan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia terutama bagi kelompok rentan dan marginal atau termarginalkan. "Untuk mewujudkan harapan baru di tahun baru, ada dua rancangan undang-undang yang sangat mendesak untuk disahkan," ujarnya melalui keterangan pers, kemarin.

Kedua RUU tersebut, imbuhnya, penting karena di dalamnya ada norma dan ikatan sosial yang bisa dijadikan payung hukum bagi perlindungan kelompok rentan. (Ind/X-11)